

## POLA PENGEMBANGAN USAHA BUMDes UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU

**Dianto Mampanini**

Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang Jawa Timur

E-mail: [dmampanini@yahoo.com](mailto:dmampanini@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to know BUMDes dynamics and role of social capital in the process of economic empowerment in plural communities through BUMDes Indragiri Hilir. The research method used is a qualitative research method, where in when the primary purpose of a study is to explore and explain the behavior rather than describe it, when the research problem is not "ordinary" and not sufficient for examination, or when the words that deserve to be communicated to the respondent is not available, the researchers are advised to indicate an answer research questions. There are two results of this study, only between: (i) BUMDes provide considerable benefits for the citizens of Indragiri Hilir i.e. creation of new businesses and employment, (ii) Social capital is defined as a social institution involving networks, norms, and belief a social, the third element is pushed on a social collaboration for economic empowerment through the development BUMDes. Based on the description and discussion of research results that have been described, it can be concluded as follows: first, the existence Dynamics BUMDes been felt by society Indragiri Hilir. Given BUMDes into village-owned enterprises that were able to move the village economy. But in its development BUMDes in Indragiri Hilir trend to move in the field of financial services businesses (micro finance) and not much engaged in the real sector. Secondly, there is the attitude of joint responsibility as a form of social capital that facilitates communication networks and interactions, enabling the growth of trust and strengthen cooperation. A healthy society is likely to have social networks that sturdy. The occurrence of strong interrelationships, both formal and informal. Social networks will strengthen the feeling of a close cooperation between the managers and the public in the use of BUMDes loans BUMDes.*

**Key word:** BUMDes, Poor Population.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika BUMDes dan peran modal sosial dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui BUMDes di Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana tujuan utama dari studi ini adalah tidak hanya untuk menggambarkan perilaku namun juga untuk mengeksplorasi dan menjelaskannya. Penelitian kualitatif dibutuhkan pada saat masalah penelitian tidak bersifat umum dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara kuantitatif, atau pada saat dibutuhkan penjelasan yang memadai untuk disampaikan kepada responden oleh peneliti. Penelitian ini menghasilkan dua hal yaitu (i) BUMDes memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Indragiri Hilir pada penciptaan bisnis dan lapangan kerja baru, (ii) Modal sosial didefinisikan sebagai sebuah institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma, dan keyakinan sosial, dimana elemen yang ketiga tersebut didorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan BUMDes. Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama,

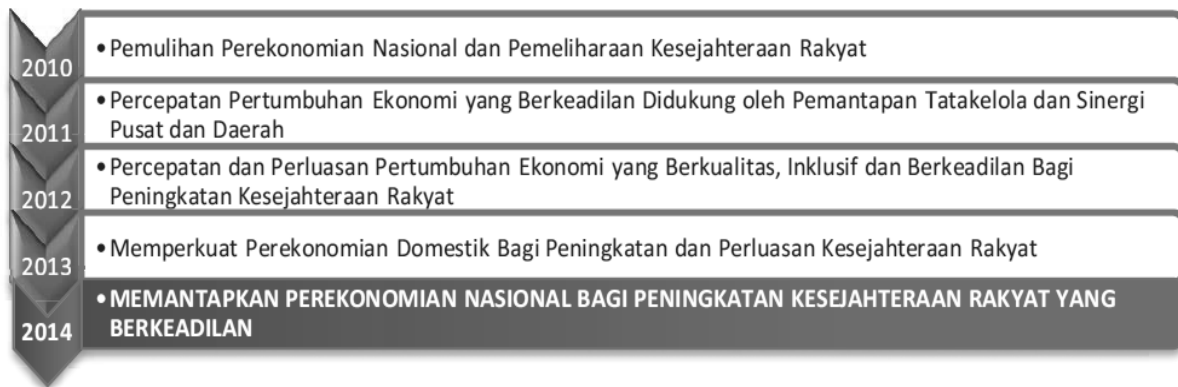
Dinamika keberadaan BUMDes dirasakan oleh masyarakat Indragiri Hilir. BUMDes yang ada mampu menggerakkan ekonomi desa, namun dalam perkembangannya BUMDes di Indragiri Hilir cenderung bergerak di bidang usaha jasa keuangan (*micro finance*) dan tidak banyak bergerak di sektor riil. Kedua, ada sikap tanggung jawab bersama sebagai bentuk modal sosial yang memfasilitasi jaringan komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Suatu masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan sosial yang kokoh. Terjadi hubungan yang kuat dalam masyarakat, baik formal maupun informal. Jaringan sosial akan memperkuat kerjasama yang erat antara manajer dan masyarakat dalam penggunaan pinjaman dari BUMDes.

**Kata kunci:** BUMDes, Penduduk Miskin.

**LatarBelakang**

Pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda besar pembangunan global. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara

maju. Indonesia terus membangun untuk memberantas kemiskinan. Banyak program-program yang dijalankan untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.



Sumber: Bappenas, 2014

**Gambar 1. Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah**

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.

Program pengentasan kemiskinan berhasil sebagaimana yang diharapkan, idealnya menggunakan pola *botton up*. Artinya, untuk memperbaiki kondisi kehidupan miskin maka yang perlu diketahui pemerintah, yaitu mereka ingin berkecimpung atau menekuni bidang usaha apa. Karena hal itu akan bermuara kepada peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mampu mengeluarkan mereka dari kategori masyarakat miskin (Dwirianto, 2013). Tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia pada tahun 2012 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinannya (BPPN, 2013).

Penelitian ini menekankan fokus pada Propinsi Riau sebagai salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya alam yang cukup banyak dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas berada di atas rata-rata nasional sebesar 7.16 persen. Propinsi Riau secara administratif terbagi ke dalam 10 Kabupaten dan 2 kota. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki wilayah terluas sebesar 1.379.837 merupakan kabupaten yang memiliki spesifik wilayah yang unik, potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia (SDM) yang multi etnis.

Kabupaten Indragiri Hilir persentase jumlah individu miskin sebanyak 21,32%. Kabupaten ini menempati peringkat ke 4 dari 12 Kabupaten Kota di Propinsi Riau pada tahun 2012. Sementara jika dilihat dari persentase individu miskin Kabupaten Indragiri Hilir terhadap jumlah penduduk propinsi Riau maka persentase individu miskin di daerah ini menempati urutan ke 4 sebesar 2,55%.

Kabupaten Indragiri Hilir menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar dalam mendukung berbagai sektor perekonomian, terutama dibidang Perkebunan, Perikanan/kelautan dan Perindustrian. Dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Kabupaten Indragiri Hilir terbagi 20 Kecamatan, 203 Desa dan 33 Kelurahan. (Pemb. Inhil, 2013). Salah satunya program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa. BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa, meliputi usaha sektor moneter (keuangan) dan sektor riil (UBPKDSP, 2007). Pengembangan bidang usaha BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal di Indragiri Hilir selama ini masih di dominasi oleh bidang usaha jasa layanan keuangan (*micro finance*) yang berfungsi untuk memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat pedesaan dibandingkan sek-

tor riil.

Di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 84% BUMDes yang ada memiliki jenis usaha di unit pelayanan jasa keuangan mikro dan hanya 16% BUMDes yang ada telah bergerak di sektor jasa layanan keuangan dan sektor riil. Dengan adanya pengembangan jenis usaha selain sektor layanan keuangan (*micro finance*) diharapkan peranan BUMDes akan lebih mampu menstimuli, memfasilitasi dan melindungi dan memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Peranan BUMDes dalam perekonomian desa dengan pendekatan pembangunan pedesaan selama ini terkesan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, dan selalu diperlakukan dengan model pembangunan dengan bantuan. Pola kebijakan yang sentralistik dan seragam tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Pola pengembangan BUMDes yang terjadi di Riau merupakan pengembangan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) yang dirasa telah matang dan mandiri untuk dikembangkan. Karena itu tidak salah BUMDes ini memiliki kualifikasi pengurus profesional, mendapat pembinaan manajemen, pengawasan, menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Sangat disadari bahwa untuk memenuhi kualifikasi ini tentu saja tidak akan mudah membentuk BUMDes (Rustam, B.R, 2012).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, modal sosial (*social capital*) merupakan salah satu modal dasar yang kurang diperhatikan selama ini. Dengan dasar ini, maka upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelembagaan harus didasarkan kepada pemahaman yang utuh terhadap ragam dan sifat modal sosial yang mereka miliki, sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih tepat (Yanti, 2008). Di sini peran modal sosial yang sangat menentukan (Mawardi, M.J, 2007). Dengan demikian, maka penting untuk dilakukan riset agar dapat dianalisis sejauh mana peran modal sosial dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan kelembagaan lokal sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan sekaligus dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir seperti tingginya tingkat kemiskinan, belum optimalnya pengembangan kelembagaan ekonomi lokal BUMDes semakin nampak bahwa pentingnya mengkaji mengenai dinamika BUMDes dan peran modal sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika BUMDes dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui BUMDes?
2. Bagaimana Peran modal sosial dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui BUMDes?

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dinamika BUMDes dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui BUMDes.
2. Mengetahui Peran modal sosial dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui BUMDes.

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes sebagai kekuatan lembaga perekonomian lokal.

2. Bagi Penelitian Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan topik penulisan untuk menambah informasi, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bagi penulisan ilmiah terkait masalah peran modal sosial dalam aspek betuk serta kontribusi mekanisme dalam mendukung keberhasilan lembaga perekonomian lokal masyarakat desa.

3. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya peran modal sosial yang dimiliki masyarakat baik nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat itu senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang bernilai harganya dalam peningkatan kesejahteraan melalui kelembagaan lokal BUMDes dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

### Tinjauan Pustaka

#### Modal Sosial

Modal sosial adalah salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Putnam (1993) mengartikan modal sosial sebagai:

*“to the notions of physical and human capital, the term social capital refers to features of social organization such as network, norms, and trust that increase a society’s structure that facilitate certain actions of actors within the structure.”*

Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan. Paparan di atas semakin menegaskan definisi modal sosial adalah sebagai kepercayaan, norma, dan jaringan yang memang anggota komunitas bertindak kolektif. Ekonomi Kelembagaan Baru percaya institusi adalah aturan main masyarakat, menetapkan batasan interaksi manusia, dan muncul dalam lingkungan bersumber daya langka untuk menghemat biaya transaksi agar lebih efektif dalam menggunakan sumber daya lembaga (Dwirianto, 2012).

Pengertian modal sosial yang lebih luas yaitu kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya (Fukuyama, 2007). Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten Putnam (1993) Oleh karena itu, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan. Terdapat tiga parameter dari modal sosial, yaitu: Kepercayaan, Norma, Jaringan. Woolcock dan Narayan (2000), membagi dalam empat yang meliputi: Pandangan Komunitarian (*communitarian view*), Pandangan Jaringan (*network view*), Pandangan Institusional (*institutional view*), Pandangan Sinergi (*sinergy view*).

### **Kemiskinan**

Cahyat Ade (2007), Kemiskinan adalah situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal: *basic need deprivation*, *unproductiveness*, *inacceribility*, *vulnerability*, dan *no freedom for poor*.

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dititikberatkan kepada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumberdaya manusia pembangunan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitas dan martabatnya. Untuk melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu transformasi peranan Pemerintah daerah dari inisiator berubah menjadi fasilitator. Perubahan paradigma baru ini ditetapkan dalam strategi pembangunan yang ditawarkan.

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan

dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri (Sumaryo, 1991; 6). Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang bersifat penyadaran masyarakat, pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, pelayanan masyarakat dan pembelaan masyarakat. Modal sosial saat ini dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Francis Fukuyama menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi.

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial memiliki empat tujuan utama sebagai

berikut: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa meliputi usaha sektor moneter (keuangan) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta sektor riil.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: (i) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa. (ii) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkeadilan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa. (iii) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainabel.

### Hasil Penelitian Terdahulu

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive de-mocracy*,

*appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Kemampuan pelaku pemberdayaan (*stakeholders*) yang utama adalah kemampuan menggali, menumbuhkan, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Menumbuh kembangkan potensi sumber daya lokal mempunyai arti yang sangat penting terutama agar masyarakat tidak tergantung pada pihak luar. Pelaku pemberdayaan harus yakin bahwa jika sumber daya dan potensi lokal bisa terangkat, maka proses pemberdayaan yang berujung pada pemandirian akan mudah dicapai. Artinya, bahwa potensi lokal akan menjadi perangsang menuju masyarakat yang berkembang, berdaya dan mandiri. Merujuk pada beberapa uraian yang dikemukakan oleh Compton dan Galaway (1989), Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), Tjokrowinoto (2001), dan Jamasy (2004), maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku pemberdayaan yang dapat memberdayakan masyarakat sebaiknya memiliki kemampuan yang memadai yang tercermin pada tiga aspek perilaku yaitu: aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Dinamika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Perkembangan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir.

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguat. Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Indragiri Hilir untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Minimal 10% dari keuntungan BUMDes per tahun menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengembangan bidang usaha BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir cenderung masih bergerak di sektor jasa layanan keuangan mikro dibandingkan sektor riil. Di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 84% BUMDes yang ada memiliki jenis usaha di unit pelayanan jasa keuangan mikro dan hanya 16% BUMDes yang ada telah bergerak di sektor riil.

Terkait dengan adanya BUMDes, beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tambah baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes di Indragiri Hilir oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan, melalui pelatihan pengelolaan BUMDes baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha BUMDes itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bumdes di Indragiri Hilir oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan, melalui : (a). Pelatihan pengelolaan BUMDes, baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes,

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha BUMDes itu sendiri; (b) Program pendampingan BUMDes dari Dinas/Instansi terkait; (c) Program sosialisasi BUMDes ke masyarakat desa, baik melalui bentuk selebaran, papan pengumuman, pemberitahuan melalui kendaraan keliling, maupun rapat desa/warga.

Manfaat BUMDes dapat dirasakan oleh warga antara lain:

a. Menciptakan Usaha

Dengan adanya BUMDes warga dapat menciptakan usaha baru, karena warga dapat meminjam dana kepada BUMDes.

b. Penyerapan Tenaga Kerja.

BUMDes membantu warga mendirikan usaha baru, dengan adanya usaha baru itu berarti banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Itulah salah satu keunggulan dari adanya BUMDes yang di satu pihak dapat meningkatkan perekonomian warga Indragiri Hilir dipihak lain mengurangi tingkat pengangguran.

## 2. Peran Modal Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Bumdes di Kabupaten Indragiri Hilir.

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Modal sosial saat ini dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Francis Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan keretakan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi.

Terdapat tiga unsur dalam modal sosial yaitu:

a. Kepercayaan (*Trust*).

Bentuk modal sosial kepercayaan dapat dilihat dari paparan program kerja pengelolah dan keyakinan masyarakat pemanfaat BUMDes akan berjalannya rencana kerja tersebut di dasari adanya saling percaya dan saling bertukar informasi melalui rembuk desa. Bentuk modal sosial kepercayaan dapat dilihat dari perguliran dana BUMDes bagi pemanfaat. Penguliran dana BUMDes diharapkan menjadi modal penunjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan akan membantu perputaran modal untuk keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

Pelayanan BUMDES di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris (Penasehat) yakni Camat setempat dan Kepala Desa serta Ketua BPD dalam pengawasan dan pertanggungjawaban BUMDes, Manajer atau Kepala Unit Usaha BUMDes bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan pada setiap akhir periode, melalui forum rembuk desa (musyawarah desa). Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

b. Jaringan (*Network*).

Modal sosial bentuk jaringan yang dibangun pengelolaan BUMDes memungkinkan terjadinya kemudahan mendapatkan dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudahan mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat pemanfaat BUMDes, perasaan ikut memiliki, memperkuat komitmen kerja, kemudahan menyusun rencana

kerja, dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan pemanfaat BUMDes serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat pemanfaat BUMDes agar tetap terpuaskan. Tanggung renteng merupakan bentuk jaringan. Ternyata jaringan dalam bentuk tanggung renteng ini bisa positif dan negatif. Tanggung renteng dalam masalah anggota kelompok yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengembalian dana pinjaman. Adanya kelompok yang terdiri dari beberapa etnis/suku maka mereka bersama-sama untuk mencoba menyelesaikan dalam bentuk tanggung renteng. Bentuk pelayanan BUMDes terhadap pemanfaat BUMDes perlu adanya sikap kepedulian, upaya motivasi usaha serta kunjungan kelokasi usaha masyarakat. Dorongan motivasi berusaha dan kunjungan kelokasi usaha masyarakat pengelola BUMDes merupakan wujud membangun jaringan dengan pemanfaat BUMDes. Bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban BUMDes dilihat dari kesediaan Dewan Komisaris dalam melibatkan diri dengan masyarakat melalui forum rembuk desa. Melalui media forum ini pengawasan Dewan Komisaris memperoleh masukan-masukan yang sifatnya membangun.

c. Norma (*Norms*).

Pada masyarakat Indragiri Hilir, norma dan nilai kehidupan budaya masih tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tetap mempertahankan budaya "*Saling Bantu-membantu*" yang merupakan modal sosial yang kuat untuk mengantisipasi perilaku-prilaku negatif seperti kecurangan dan individualisme yang dapat mengancam kegiatan usaha. Peran BUMDes dalam pengelolaan dana pinjaman sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pengelolaan dana pinjaman BUMDes relatif bisa di *handle*, meskipun dalam praktiknya pekerjaan pengelola bukan sebagai pengelola BUMDes saja. Peran dalam pelayanan BUMDes sangat menentukan tingkat keberhasilan program



yang sedang dijalankan. Dilihat bahwa pelayanan BUMDes boleh dikatakan sudah maksimal.

Mawardi M. J. (2007) berargumen norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan disertasi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika keberadaan BUMDes selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indragiri Hilir. Mengingat BUMDes menjadi badan usaha milik desa yang mampu menggerakkan ekonomi desa. Keberadaannya mampu memberikan pelayanan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dalam diversifikasi usaha, menciptakan usaha serta penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir cenderung bergerak didalam bidang usaha jasa layanan keuangan (*micro finance*) dan belum banyak bergerak dibidang sektor usaha riil.
2. Adanya sikap tanggung renteng sebagai bentuk modal sosial jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Terjadinya inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal. Jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama antara pengelola BUMDes dan masyarakat dalam pemanfaatan dana pinjaman BUMDes.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan peran modal sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Saran-saran dimaksud adalah:

1. BUMDes untuk lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seyogyanya sektor usaha riil perlu disentuh dan dikembangkan disamping sektor layanan keuangan (*Micro finance*) melihat potensi alam yang dimiliki sehingga diharapkan nantinya masyarakat miskin dan UKM yang ada lebih terbantuan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
2. Dalam pelaksanaan sikap tanggung renteng seyogyanya ditempatkan orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam pemanfaatan dana pinjaman BUMDes dan mampu menimbulkan semangat anggota BUMDes yang lain untuk menyadari pemanfaatan dana bergulir dengan tidak bermasalah dengan dana pinjaman diterima karena akan mengganggu keberlanjutan usaha dan kelancaran perputaran modal dana BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan perekonomian masyarakat.
3. Revitalisasi perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, karena diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan yang masih dianggap mampu meningkatkan peran modal sosial dan BUMDes sehingga nantinya kebijakan ini memang memihak pada lembaga tersebut dan masyarakat sekitarnya yang dapat dirasakan baik oleh pengelola BUMDes maupun oleh mitra binaan dan masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- BPK Prop. Riau. 2009. Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kab Indragiri Hilir, Pekanbaru: <http://pekanbaru.bpk.go.id>.
- Cahyat, Ade. 2007. Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga. Bogor: *Center for International Forestry Research*.
- Dwirianto, Sabarno. 2012. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal Berbasis Kecakapan Hidup (*Life Skill*) di Kota Pekanbaru, Disertasi tidak dipublikasikan. Malang: Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Fukuyama, Francis. 1999. *The Great Disruption Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. New York: *The Free Press*.
- Mawardi M. J. 2007. Peranan *Social Capital* dalam Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.
- Pemkab Inhil. 2013. Profil kondisi umum Inhil, <http://inhilkab.go.id>, Tembilahan.
- Putnam, Robert. 1993. *The Prosperous Community-Social Capital and Public Life, American Prospect*.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University.
- Putnam, Robert. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community, Journal of Polical Science and Politics*.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University.
- Rustam, B. R. (2012). Pemberdayaan Modal Finansial Masyarakat. Pekanbaru: <http://www.riaupos.co/opini>.
- Sumaryo. 1991. Implementasi *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dalam Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan dalam Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Mutu Pengabdian pada Masyarakat, di IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
- Wiki. Aswajanu. 2013. Kabupaten Indragiri Hilir-potensi, [http://wiki.aswajanu.com/Kabupaten Indragiri Hilir](http://wiki.aswajanu.com/Kabupaten%20Indragiri%20Hilir).
- Woolcock, Michael. 2002. “*Social Capital Theory and Practice*” in *Social Capital and Poverty Reduction Which Role of the Civil Society Organizations and State*. UNESCO.
- Woolcock Michael and Narayan D. (2000). *Sosial Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. The World Bank Research Observer, vol. 15 no. 2.
- Yanti, Budi. 2008. Peranan Modal Sosial dan Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin melalui Pengembangan Kelembagaan sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang). Yogyakarta: Jurnal Universitas Tamansiswa.